

ABSTRAK

SITI IRPATUL MUNAWAROH 8323145387, Analisis Penerapan Efektivitas Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Unit Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Jakarta Selatan), Program D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.

Dalam jalur desentralisasi fiskal, hasil pada penerimaan pajak dan restribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD), akan tetapi kebutuhan pada pembangunan daerah pada berbagai macam sektor yang sangat mendesak dan menjadi prioritas utama yang juga selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tingkat Efektivitas setiap tahunnya tidak mengalami kestabilan dalam potensi penerimaan PBB-P2 di wilayah Jakarta Selatan.

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan cara UPPRD Jakarta Selatan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan hak WP seperti Pengurangan PBB namun harus tetap memperhatikan dengan baik agar tidak salah memberikan pengurangan PBB ke WP yang mampu.

Kata Kunci : Analisis Penerapan Efektivitas Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Unit Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Jakarta Selatan) , Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Jakarta Selatan

ABSTRACT

SITI IRPATUL MUNAWAROH 8323145387, Analysis of Effectiveness Implementation of Governor Regulation no. 211 Year 2012 on the Reduction of PBB-P2 In DKI Jakarta Province (Case Study of Regional Tax Service and Area Restribution South Jakarta), Accounting D3 Program, Faculty of Economics, Jakarta State University, 2018.

In the fiscal decentralization pathway, the results of tax revenues and regional restitution have a significant role in Local Revenue (PAD), but the need for regional development in various sectors is very urgent and a top priority which also always increases in each year . The level of effectiveness annually does not experience stability in the PBB-P2 potential of revenue in South Jakarta.

The solution in facing these obstacles is by UPPRD South Jakarta can improve the service to the community and give WP rights such as United Nations Reduction but must keep paying good attention so as not to give wrong reduction of PBB to WP capable.

Keywords: Analysis of Effectiveness Implementation of Governor Regulation no. 211 Year 2012 on Reducing PBB-P2 In DKI Jakarta Province (Case Study of Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah of South Jakarta), Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Jakarta Selatan